

LAPORAN TAHUNAN 2023

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Amanat Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa Badan Publik, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), wajib menyediakan informasi publik yang dikuasainya dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

Tidak hanya menyediakan informasi publik, sebagai Badan Publik, BPOM juga melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus mencapai pelayanan informasi publik yang prima. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tersebut, BPOM telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang PPID di Lingkungan BPOM.

Seiring dengan itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Dit PMPUOTSKK) selaku salah satu PPID Pelaksana Unit Kerja di lingkungan BPOM terus melakukan berbagai pembenahan salah satunya melalui penyiapan unit kerja pada pemetaan awal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada tahun 2022 yang akan dilanjutkan dengan pembenahan internal untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di BPOM melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada tahun 2023.

Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPOM Tahun 2023 ini menyampaikan informasi terkait upaya-upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Dit. PMPUOTSKK selama tahun 2023. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Dit. PMPUOTSKK

Jakarta, 5 Januari 2024
PPID Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Nurvika Widyaningrum, S.Farm.,Apt.,M.Epid

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keterbukaan informasi publik sangat mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik, BPOM telah menetapkan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK) mulai melakukan berbagai pembenahan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di unit kerja. Sebagai bukti komitmen dalam pemetaan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, dan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK berhasil meraih TOP 5 PPID Pelaksana diantara Unit Kerja Pusat. Hasil ini menjadi awal yang baik dalam pengelolaan layanan publik di Dit. PMPUOTSKK. Dari hasil pemetaan tersebut terdapat pula beberapa catatan untuk perbaikan kedepan yang tentunya menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan publik di tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR GRAFIK.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
A. Tugas dan Fungsi.....	7
B. Struktur Organisasi.....	8
C. Visi dan Misi.....	9
D. Maklumat Layanan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Sarana Layanan.....	11
B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	13
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
A. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	15
B. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik.....	15
BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2023.....	22
A. Kegiatan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	22
B. Capaian PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	27
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	29
A. Kendala Eksternal.....	29
B. Kendala Internal.....	29
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	30

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	9
Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	10
Gambar 2.1 Media Pelayanan Informasi Publik.....	11
Gambar 2.2 Ruang Tunggu Layanan Dit PMPUOTSKK.....	11
Gambar 2.3 Ruang Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK	12
Gambar 2.4 Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik.	12
Gambar 4.1 Dokumentasi Digitalisasi Layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	21
Gambar 4.2 Dokumentasi Intensifikasi Penyebaran Informasi Melalui Pendampingan UMKM dan Pembentukan Penyuluh/Kader/Duta.....	22
Gambar 4.3 Dokumentasi Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik.....	23
Gambar 4.4 Dokumentasi Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik.....	25
Gambar 4.5 Dokumentasi Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik.....	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Profil SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	Hal 13
------------	---	-----------

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Daftar Peningkatan Kompetensi SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK.....	14
Tabel 3.1	Daftar Informasi Publik di Media Instagram Dit PMPUOTSKK.....	21

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi sejak tahun 2008, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP beserta peraturannya mengamanahkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Keterbukaan Informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008.

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keduanya mengamanatkan badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

BPOM sebagai Badan Publik telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai Amanah Undang _ Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Badan POM selalu berupaya meningkatkan pelayanan informasi. Salah satunya, pada tahun 2009 PPID Badan POM mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi melalui subsite PPID (ppid.pom.go.id) dan PPID Mobile.

Dengan sistem tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi atau keberatan dengan cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Subsite PPID dan PPID Mobile juga dilengkapi dengan informasi mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.

Sebagai bukti komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik BPOM setiap tahun, BPOM berpartisipasi dalam morev KIP dan telah memperoleh predikat Informatif sejak tahun 2020 sampai 2022. BPOM menjadi badan publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh nilai tertinggi dari sebanyak 32 badan publik yang lolos tahap uji publik pada morev KIP tahun ini. Nilai yang diperoleh BPOM adalah sebesar 98,14 berdasarkan penilaian dari pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ), presentasi uji publik, dan visitasi yang telah dilakukan pada 13 Desember 2023

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan POM, pada tahun 2023 PPID Badan POM mengalami perubahan stuktur organisasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk di dalamnya adalah PPID Pelaksana di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang membawahi Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Petugas Pelayanan Informasi Publik.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK mempunyai :

1. Tugas:

- a. membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya;
- e. membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h. mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- i. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- j. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID; dan
- k. melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

2. Wewenang :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak;
- d. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta

pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik (PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK) terdiri atas:

1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

C. Visi dan Misi

Visi: Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

D. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Layanan

Ketersediaan sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK. Media layanan PPID Dit PMPUOTSKK baik secara elektronik maupun non elektronik yaitu:



Gambar 2.1 Media Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK



Gambar 2.2 Ruang Tunggu Layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK



Gambar 2.3 Ruang Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK



Area Parkir Khusus Difabel



Step lobby bagi pengguna kursi roda



Toilet Khusus Difabel

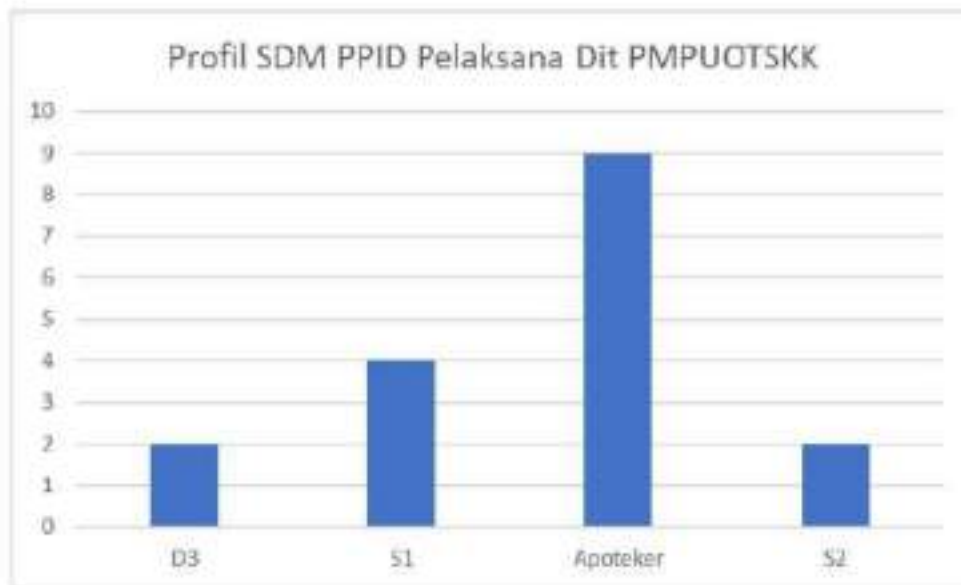


Kursi Roda dan Petugas Khusus yang Membantu

Gambar 2.4 Sarana Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK didukung oleh SDM sebanyak 17 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dengan latar belakang pendidikan D3 (11.76%), Sarjana (23.53%), Apoteker (52.94%), dan Magister (11.76%) .



Grafik 2.1 Profil SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin berkembang, sehingga menuntut Direktorat PMPUOTSKK untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini sebagaimana berikut :

No	Judul/Tema Kegiatan/Bimtek/Tempat Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi/Pelaksanaan Workshop	Unit Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Berakhlak	PPSDM POM	09/11/2023
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	09/11/2023
3	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	30/10/2023-31/10/2023
4	Orientasi Kepramukaan Tim Pengelola Satuan	PPSDM POM	12/10/2023

	Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023		
5	Pengelolaan Arsip Digital	PPSDM POM	18/09/2023
6	Bimbingan Teknis Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Badan POM	Biro Hukum dan Organisasi	12/09/2023
7	Short Course : Media Campaigns for Social Change and Advocacy in Netherlands	PPSDM POM	04/09/2023
8	Awareness Keterbukaan Informasi Publik	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	24/08/2023
9	Pelatihan Teknis Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Berbasis E-Learning Tahun 2023	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	31/07/2023-10/8/2023
10	CPOTB Tahap 1	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	27/07/2023
11	Pendampingan UMKM Obat Tradisional melalui Fasilitator	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	25/07/2023-26/07/2023
12	Ide dan Sejarah NLP	PPSDM POM	18/07/2023
13	Pemanfaatan NLP dalam Peningkatan Kompetensi	PPSDM POM	18/07/2023
14	Bimtek Analisis Gender	Biro Perencanaan dan Keuangan	03/07/2023-04/07/2023
15	Supervisory Development Program - Managing Team	PPSDM POM	13/03/2023
16	Pedoman Penyusunan Bahan Substansi Kegiatan Pimpinan BPOM;Konsep Buku Kumpulan Pidato Ka BPOM;paparan buku	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	05/04/2023

Tabel 2.1 Daftar Peningkatan Kompetensi SDM PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOSKK Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak ada permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Dit PMPUOSKK

B. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik

Sesuai Daftar Informasi Publik yang digunakan di Lingkungan Dit PMPUOSKK, terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang telah di *mutakhirkan* pada subsite Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (pmpuotsskos.pom.go.id), @ pmpuotss.bpom serta informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pusat yang dituangkan dalam Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Badan POM, sebagai berikut :

1. Jenis informasi yang telah dimutakhirkan pada pmpuotsskos.pom.go.id
 - a. Informasi wajib diumumkan secara serta merta, antara lain:
 - 1) Jadwal Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK dan KOS
 - 2) Jadwal Petugas Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK dan Kos
 - 3) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022
 - 4) Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik
 - 5) Pengumuman Layanan Tatap Muka
 - 6) Jadwal Layanan Tatap Muka Selama Bulan Ramadhan
 - 7) Penyesuaian Jadwal Layanan Dit. PMPU OT,SK dan KOS 19-25 April 2023
 - 8) Jadwal Layanan Informasi Publik Direktorat PMPU OTSKK
 - 9) Klarifikasi BPOM
 - 10) Prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 - 11) Klarifikasi BPOM Komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - 12) Maklumat Pelayanan Dit. PMPU OTSKK
 - b. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain:
 - 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2023 Direktorat PMPU OTSKK
 - 2) Plan of Action (POA) 2023 Direktorat PMPU OTSKK
 - 3) Capaian Kinerja Direktorat PMPU OTSK Tahun 2021
 - 4) Capaian Kinerja Direktorat PMPU OTSK Tahun 2022
 - 5) Peta Strategis Level 2 dan Manual IKU Direktorat PMPU OTSKK
 - 6) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW I Tahun 2023
 - 7) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW II Tahun 2023

- 8) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW III Tahun 2023
- 9) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW I Tahun 2022
- 10) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW II Tahun 2022
- 11) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW III Tahun 2022
- 12) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW IV Tahun 2022
- 13) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW II Tahun 2021
- 14) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW III Tahun 2021
- 15) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat PMPU OTSKK TW IV Tahun 2021
- 16) Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 17) Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT
- 18) Laporan Tahunan PMPU OTSKK Tahun 2021
- 19) Laporan Tahunan PMPU OTSKK Tahun 2022
- 20) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021
- 21) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022
- 22) Laporan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Survei Efektifitas KIE TW 1 Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2023
- 23) Laporan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Survei Efektifitas KIE TW 2 Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2023
- 24) Laporan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Survei Efektivitas KIE TW 3 Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2023
- 25) Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Direktorat PMPU OTSKK
- 26) Berkas Dokumen Pengadaan
- 27) Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik
- 28) Laporan BMN Audited Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022
- 29) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) TW I Tahun 2023
- 30) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) TW II Tahun 2023
- 31) Data Industri Jamu yang Bergabung Dalam Program Orang Tua Angkat
- 32) Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Prioritas Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Bidang Obat Dan Makanan
- 33) Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Maret 2023

- 34) Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Mei 2023
- 35) Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Juni 2023
- 36) Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) September 2023
- 37) Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) November 2023
- 38) Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Desember 2023
- 39) Matriks Rekapitulasi MoU Badan POM dengan Perguruan Tinggi
- 40) Laporan Monitoring Dan Evaluasi Nilai Indeks Survey Efektivitas KIE TW4 Tahun 2023 Di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik

c. Informasi wajib tersedia setiap saat, antara lain :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat PMPU OTSK
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat PMPU OTSK
- 3) Rencana Kinerja Tahunan - Tahun 2022 Direktorat PMPU OTSK
- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat PMPU OTSK
- 5) Rencana Kinerja Tahunan - Tahun 2023 Direktorat PMPU OTSKK
- 6) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 Direktorat PMPU OTSKK
- 7) Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Untuk Industri Kosmetik Gol B
- 8) Ebook Cara Pembuatan Jamu Gendong
- 9) Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik
- 10) Modul Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik yang Aman
- 11) Modul Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat Tradisional yang Aman
- 12) Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Kosmetika / Jamu Aman
- 13) Modul Pembelajaran Profil BPOM
- 14) Jurnal Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Untuk Industri Gol B
- 15) Petunjuk Teknis Pembentukan Kader Daerah Melalui Program Badan POM Goes to Community
- 16) Buku Saku Perizinan Kosmetik
- 17) Buku Saku Cara Pembuatan Jamu Gendong yang Baik
- 18) Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM
- 19) Standar Layanan Direktorat PMPU OTSKKOS 23 Juni 2022
- 20) Susunan Petugas Pelaksana Pelayanan Publik Dit. PMPU OT,SK dan KOS
- 21) Surat Keputusan PPID Direktorat PMPU OTSKK
- 22) Sumber Daya Manusia Direktorat PMPU OTSKKOS
- 23) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- 24) Chart Kepegawaian
- 25) Chart Keuangan
- 26) Daftar Arsip Aktif
- 27) Renstra
- 28) Data Layanan Dit. PMPUOTSKK

2. Informasi publik seri Senin Suplemen Kesehatan, Rabu Jamu dan Kamis Kosmetik pada Instagram @ pmpuotskk.bpom :

No	Judul	Tanggal Tayang
1	Suplemen Kesehatan Mata	2 Januari 2023
2	Mitos & Fakta : Benarkah Telang (<i>Clitoria tematea</i> L.) membantu kesehatan mata?	4 Januari 2023
3	Curcumin	9 Januari 2023
4	Edisi Perizinan : Dokumentasi Registrasi Baru Produk Obat Tradisional	12 Januari 2023
5	Mengenal Dokumen Informasi Produk (DIP)	12 Januari 2023
6	Vitamin B1 (Tiamin)	19 Januari 2023
7	Tahukah Kamu : Perbedaan Tanaman Kolesom dan Som Jawa	19 Januari 2023
8	Wajah Sehat Tanpa Krim Racikan Abal-abal	19 Januari 2023
9	Asam Folat (Vit B9)	24 Januari 2023
10	Berita Viral Obat Tradisional	25 Januari 2023
11	Bedanya Sunscreen dan Sunblock	26 Januari 2023
12	Bolehkan Suplemen Kesehatan mengandung Bahan Tambahan?	30 Januari 2023
13	Buat Jamu Sinapsis (Sawi Nanas Jeruk Nipis)	1 Februari 2023
14	Cara Cek 2D Barcode produk kosmetik	02 Februari 2023
15	Mengenal Suplemen Kesehatan Mata part 2	7 Februari 2023
16	Edisi Perizinan : Dokumen Registrasi Ulang Obat Tradisional	8 Februari 2023
17	Effervescent	13 Februari 2023
18	Taukah Kamu Guraka Minuman Khas Maluku?	15 Februari 2023
19	Manfaat Produk Kecantikan Alami	16 Februari 2023
20	Mengenal Asam Amino Esensial (Sesi 1)	20 Februari 2023
21	Mengenal Suplemen Kesehatan Gigi (Flour)	27 Februari 2023
22	Mengenal Manfaat Jamu	1 Maret 2023
23	Ingin cantik jangan salah pilih kosmetik	3 Maret 2023
24	Riboflavin (Vit B2)	6 Maret 2023
25	Mitos atau Fakta : Bawang Merah yang dicampur dengan minyak (minyak telon/minyak kelapa) dapat menurunkan demam pada anak?	8 Maret 2023
26	Bentuk Sediaan Suplemen Kesehatan	13 Maret 2023
27	Hot News : BPOM Temukan Obat Tradisional Tak Aman	15 Maret 2023
28	Biaya Pengurusan Izin Edar UMKM Kosmetik di Badan POM?	17 Maret 2023
29	Beta Glukan	20 Maret 2023
30	Edisi Perizinan : Dokumen Registrasi Variasi Obat Tradisional	22 Maret 2023
31	Suplemen Kesehatan untuk Tulang	27 Maret 2023
32	Jamu Kekinian	29 Maret 2023
33	Rumah Informasi Kosmetik	30 Maret 2023
34	Mengenal Asam Amino Esensial (Sesi 2)	3 April 2023
35	Kajian Penggunaan Ramuan Kecipir & Kencur	5 April 2023
36	Bahan yang dilarang atau berbahaya dalam	6 April 2023

No	Judul	Tanggal Tayang
	kosmetik dan efeknya	
37	Yuk Mengenal Beta Karoten Pro Vitamin A	10 April 2023
38	Testimoni Pelaku Usaha Pada Kegiatan Coaching Clinic Perizinan UMKM dan Registrasi Obat Tradisional	12 April 2023
39	Suplemen Kesehatan bagi Penderita Hipertensi	17 April 2023
40	Tips Membawa Obat Tradisional Dalam Perjalanan Mudik	19 April 2023
41	Suplemen Kesehatan bagi Pasien Diabetes	24 April 2023
42	Pesan dan Kesan Orang Tua angkat Jamu dan Anak Angkat Jamu	26 April 2023
43	Vitamin B3 (Niacin)	1 Mei 2023
44	Mengenal Manfaat Rimpang (<i>Rhizoma</i>) Alang-Alang (<i>Imperata cylindrica</i> L)	3 Mei 2023
45	Tips Menjaga Kesehatan Setelah Mudik Lebaran	8 Mei 2023
46	Integrasi Aplikasi Perizinan BPOM dengan OSS RBA	10 Mei 2023
47	Asam Amino Non Esensial	15 Mei 2023
48	Mitos atau Fakta? Benarkah Lidah Buaya (<i>Aloe vera</i>) Bermanfaat dalam penyembuhan luka?	18 Mei 2023
49	Suplemen Kepadatan Tulang	22 Mei 2023
50	Mengenal Manfaat Ciplukan (<i>Physalis angulata</i> L.)	24 Mei 2023
51	Suplemen Kesehatan Mengandung Karnitin	29 Mei 2023
52	Daun Kejibeling (<i>Strobilanthes crispus</i> Bl)	7 Juni 2023
53	Obat Tradisional Mengandung BKO	14 Juni 2023
54	Sediaan pada Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	22 Juni 2023
55	Mengenal Meniran	3 Juli 2022
56	Panduan Permohonan PB UMKU melalui OSS RBA dan e sertifikasi	5 Juli 2022
57	Kosmetik tematik	6 Juli 2022
58	Serba serbi suplemen kesehatan seri 1	10 Juli 2022
59	Jamu megandung BKO	12 Juli 2022
60	Edukasi Penggunaan Kosmetik	13 Juli 2022
61	Serba serbi suplemen kesehatan seri 2	17 Juli 2022
62	Tahapan Perizinan Kosmetik di BPOM	21 Juli 2022
63	Suplementasi untuk stunting	25 Juli 2022
64	Alur pelayanan permintaan informasi publik	26 Juli 2022
65	Persyaratan pengajuan keberatan	26 Juli 2022
66	Kemudahan Registrasi Produk Obat Tradisional dan Obat Kuasi bagi UMKM	26 Juli 2022
67	Alpha arbutin	27 Juli 2022

No	Judul	Tanggal Tayang
68	Suplemen kesehatan bagi pasien demensia	31 Juli 2022
69	Fasilitator UMKM OT UPT BPOM	2 Agustus 2022
70	Nomor notifikasi Kosmetik	3 Agustus 2022
71	Asam arakidonat	7 Agustus 2022
72	Tarif perizinan produk obat tradisional	9 Agustus 2022
73	Tebak tebak kosmetik	10 Agustus 2022
74	Vitamin B2	14 Agustus 2022
75	Brotowali	16 Agustus 2022
76	Tebak tebak kosmetik	18 Agustus 2022
77	Asam folat	22 Agustus 2022
78	Jamu	23 Agustus 2022
79	Tips kosmetik aman bagi kulit sensitif	25 Agustus 2022
80	Suplemen kesehatan untuk rheumatoid arthritis	28 Agustus 2022
81	Tahukah kamu perbedaan daun jintan dan jintan	30 Agustus 2022
82	Kosmetik Kit	31 Agustus 2022
83	Masalah radikal bebas	6 September 2022
84	Garam Himalaya	7 September 2022
85	Asam lemak omega 3	11 September 2022
86	Zat besi	18 September 2022
87	Cerdas memilih obat tradisional aman	21 September 2022
88	Perizinan kosmetik	22 September 2022
89	Kanal LAPOR	22 September 2022
90	Prebiotik	25 September 2022
91	Manfaat jamu	27 September 2022
92	Kenali obat tradisional mengandung BKO	28 September 2023
93	Mengenal kolagen	28 September 2024
94	Suplementasi Mencegah Stunting	2 Oktober 2023
94	TTK	4 Oktober 2023
95	Sanksi pembuatan dan peredaran kosmetik yang TMK	5 Oktober 2023
96	Zat Besi	9 Oktober 2023
97	Aplikasi BPOM Public Warning	11 Oktober 2023
98	Shampoo kembang sepatu untuk rambut rontok	12 Oktober 2023
99	Magnesium	16 Oktober 2023
100	Waspada klaim jamu berlebihan	18 Oktober 2023
101	Krim pemutih mengandung hidroquinone	19 Oktober 2023
102	Coffein	25 Oktober 2023
103	DIP	26 Oktober 2023
104	SK berbahan herbal	30 Oktober 2023
105	Resep Daun Sukun	2 November 2023
106	Kosmetik isi ulang	2 November 2023
107	Mengenal suplemen facts	6 November 2023
108	Produk OT dan SK Impor di Indonesia	8 November 2023
109	Kenali Kosmetik dengan klaim berlebihan	9 November 2023
110	Biotin	13 November 2023
111	Cara aman mengonsumsi kombinasi Obat Kimia dengan OBA	15 November 2023
112	Hindari Tipu Daya Kosmetik ilegal	16 November 2023
113	Mengenal AA	22 November 2023

No	Judul	Tanggal Tayang
114	Yuk Kenali Penyebutan Barunya	22 November 2023
115	Uji Kepekaan Kosmetik	23 November 2023
116	Cantik tidak harus putih	24 November 2023
117	Probiotik pada SK	27 November 2023
118	Yuk kenali overclaim pada kosmetik	29 November 2023
119	5 Langkah Identifikasi Produk Kosmetik	1 Desember 2023
120	Ekstrak GB	4 Desember 2023
121	Penggolongan OBA	6 Desember 2023
122	Hypocallergenic	7 Desember 2023
123	Perbedaan Jamu dengan Minuman Botanical	13 Desember 2023
124	Sabun alga	14 Desember 2023
125	Serba serbi kalium	18 Desember 2023
126	Manfaat Mentimun untuk Perawatan Kulit Wajah	21 Desember 2023
127	Daftar Mineral yang dilarang	25 Desember 2023
128	Istilah dalam perizinan kosmetik	28 Desember 2023

Tabel 3.1 Daftar Informasi Publik di Media Instagram Dit PMPUOTSKK

3. Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat yaitu
 - 1) Daftar Orang Tua Angkat Jamu
 - 2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Terkait Obat Tradisional, suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2023

A. Kegiatan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

1. Digitalisasi Layanan PPID meliputi
 - a. Subsite <https://pmpuotskkos.pom.go.id> dengan menu/direktori khusus PPID Pelaksana
 - b. Layanan permintaan informasi dan pengajuan keberatan yang terhubung dengan website resmi (utama) PPID BPOM : <https://ppid.pom.go.id>
 - c. Dokumentasi layanan informasi publik tahun berjalan melalui melalui aplikasi SimpelLPK
 - d. Menu Rumah Informasi Kosmetik (RIK) pada <https://istanaumkm.pom.go.id> untuk membantu Industri Kosmetik Golongan B (UMKM Kosmetik) dalam penyusunan dokumen SPA CPKB . Terdapat Live chat konsultasi dan akses informasi seputar Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Persetujuan NIE (Nomor Notifikasi Kosmetik), Rancang Denah, Pendaftaran Notifikasi Kometik , Regulasi Kosmetik, Akses Permodalan, Pemasaran dan Manajemen Usaha, Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik, NIB
 - e. Media Sosial Instagram, facebook, youtube dan tik tok
 - f. KIE Pelayanan Publik Berkala pada Media Sosial: @ pmpuotskk.bpom yaitu KIE seputar Suplemen Kesehatan setiap hari Senin, Jamu setiap hari Rabu dan Kosmetik setiap hari Kamis dengan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat



Gambar 4.1 Dokumentasi Digitalisasi Layanan PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

2. Intensifikasi Penyebaran Informasi Melalui Pendampingan UMKM dan Pembentukan Penyuluh/Kader/Duta meliputi :

- a. Penyebaran informasi dan pendampingan *onsite* pada sarana UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik terkait Cara Pembuatan Obat Tradisional/Kosmetik yang Baik, bertujuan untuk percepatan start up UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik menghasilkan produk memenuhi persyaratan, aman bermutu dan bersaing.
- b. Program BISA UMKM dan Knowledge Sharing BISA UMKM (BINCANG BINCANG SAMA UMKM) merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM terkait pembuatan, permodalan, pemasaran, iklan, untuk menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu, dan berdaya saing. SHARING KNOWLEDGE PROGRAM OTA merupakan program industri obat tradisional yang tergabung dalam OTA Jamu dan Anak Angkat UMKM Obat Tradisional sehingga dapat mewujudkan UMKM Obat Tradisional yang mandiri dan berdaya saing.
- c. BPOM Goes To School/Campus merupakan strategi dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sehingga mampu menjadi *influencer* bagi masyarakat dan jumlah masyarakat yang ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keamanan dan manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik meningkat dengan cepat dan cakupannya di seluruh Indonesia . Program ini berhasil mendapatkan :
 - ✓ Apresiasi dari Kemendikbudristek berupa Anugerah Mitra Kerja Sama Pendukung Program Dikti Ristek (mendukung pengabdian kepada Masyarakat dan program transformasi Pendidikan Tinggi)
 - ✓ Rekor MURI program pemberdayaan KIE Duta Kosmetik dan Jamu Aman dengan peserta terbanyak (1917 Duta, 1360 Komunitas dan 1.955.850 orang peserta)



Gambar 4.2 Dokumentasi Intensifikasi Penyebaran Informasi Melalui Pendampingan UMKM dan Pembentukan Penyuluh/Kader/Duta

3. Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik bersama pihak eksternal BPOM meliputi modul / buku saku :

- a. Penyusunan modul ajar untuk Duta/Penyuluh/Kader: Cerdas Memilih Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman bersama :
 - ✓ Akademisi : Prof. Dr. dr. Purwanti Astuti Ascobat,MS., SpFK (UI), Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si,Apt (UGM)
 - ✓ Praktisi : Dr.dr. Fitria Agustina, SpKK, FINSVD,FAADV
 - b. Penyusunan Buku saku/Modul untuk Pelaku Usaha : Cara Pembuatan Jamu Gendong Yang Baik bersama :
 - ✓ Balitro (Dr. Oti Rostiana , M.Sc)
 - ✓ Pemerhati Jamu : Kampung Jamu dan Jamu Digital (Ir. Heru D Wardana, M.Hort /Karyanto, SF)
 - ✓ Pelaku Usaha : Acaraki (Arief Eka Wardana,S.Farm.,Apt)
4. Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik bersama pihak internal BPOM yaitu Pusdatin POM dan UPT BPOM untuk aliran data pada *BPOM Operation Centre* yaitu:
- a. Total Capaian Pelaksanaan KIE oleh Duta/Kader/Penyuluh dan Peta Sebaran Capaian Pelaksanan KIE
 - b. Capaian output : presentase realisasi tiap kegiatan perbulan dari RO:
 - ✓ Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Obat Tradisional dan Kosmetik yang sesuai standar, Fasilitator Pemberdayaan Pelaku UMKM Obat Tradisional yang sesuai standar dan
 - ✓ Fasilitator Pemberdayaan Pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar



Gambar 4.3 Dokumentasi Kolaborasi Penyediaan Informasi Publik

5. Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik bersama pihak eksternal BPOM meliputi :
 - a. KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat
 - b. Publikasi Standar Pelayanan Informasi Publik pada Media Indonesia
 - c. Ringkasan Informasi Pembentukan Penyuluh/Kader Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam rangka BPOM Goes To *Community* pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ditulis oleh peserta Penyuluh Pondok Pesantren KHAS Kempek)
 - d. Berita Aktual pada website Pemerhati Jamu:
 - e. "BPOM Membangun Kejayaan Baru Jalur Rempah Indonesia" pada website jamu digital
https://www.jamudigital.com/berita?id=Membangun_Kejayaan_Baru_Jalur_Rempah_Indonesia
 Partisipasi Dit PMPUOTSKK memberikan bimtek, pendampingan dan stikerisasi jamu gendong
 - f. "Reog Ponorogo Dapat Banyak Dukungan untuk Diakui UNESCO" pada website RRI :
<https://www.rri.co.id/nasional/336798/reog-ponorogo-dapat-banyak-dukungan-untuk-diakui-unesco>
 - g. Partisipasi Dit PMPUOTSKK, BPOM menghadirkan pelaku usaha jamu gendong sebagai peserta pawai seni budaya dari Sabang sampai Merauke
 - h. "Pengetahuan Keamanan Terkait Jamu dan Obat Tradisional Perlu Ditingkatkan" pada website Republika :
https://www.republika.co.id/berita/reyfen463/pengetahuan-keamanan-terkait-jamu-dan-obat_x0002_tradisional-perlu-ditingkatkan
 - i. Partisipasi Dit PMPUOTSKK sebagai penginsiasi program BPOM Goes To School/Campus
 - j. Berita Aktual pada website Kementerian :
 "Destinasi Wisata Jamu Kiringan Dukung Wellness Tourism" pada website Kemenpan RB :
<https://www.menpan.go.id/site/>
 - k. Dit PMPUOTSKK sebagai penginisiasi program Pencanaan Desa Wisata Jamu
 - l. Berita Aktual pada Asosiasi :
 "Sertifikasi Bertahap CPOTB dan Sertifikasi Bagi TTK se Indonesia" pada media sosial PPJAI (Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia)
 - m. Partisipasi Dit PMPUOTSKK sebagai narasumber pada Bimtek Sertifikasi Bertahap CPOTB
 - n. Publikasi Kegiatan KIE Duta kepada Masyarakat dalam rangka program BOM Goes To School/Campus pada akun medsos Duta

6. Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik bersama pihak internal BPOM :

- a. Kolaborasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dan UPT BPOM melalui istanaumkm.pom.go.id pada menu RIK, berupa : Konten edukasi dan informasi seputar Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Persetujuan NIE (Nomor Notifikasi Kosmetik), Rancang Denah, Pendaftaran Notifikasi Kometik , Regulasi Kosmetik, Akses Permodalan, Pemasaran dan Manajemen Usaha, Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik, NIB
- b. Kolaborasi dengan Pusdatin POM meliputi :
 - ✓ publikasi Modul/Buku Saku Cara Pembuatan Jamu Gendong/Jamu Racikan yang Baik pada e-perpustakaan BPOM
 - ✓ tayang berita *Aktual Kick Off* dan *Training of Trainer (ToT)* Pembentukan Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetika Aman pada website BPOM (www.pom.go.id)
<https://www.pom.go.id/berita/badan-pom-berikan-pembekalan-untuk-pembentukan-duta-jamu-dan-kosmetika-aman>



Gambar 4.4. Dokumentasi Kolaborasi Pengumuman Informasi Publik

7. Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik

- a. BKPM : Pejabat Penghubung BPOM pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk layanan informasi dan konsultasi bidang Obat Tradisional dan Kosmetik (2023-2024)
- b. Praktisi KIP dan PPID BPOM dalam Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Informasi (PPI) pada: Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 19-21 Juni 2023

- ✓ Workshop Penetapan DIP dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 24 Agustus 2023
- c. Unit Kerja BPOM
- ✓ Live chat konsultasi dan informasi pada menu Rumah Informasi Kosmetik (RIK) di subsite Istana UMKM
 - ✓ E-formulir permintaan informasi publik



Gambar 4.5 Dokumentasi Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik

B. Capaian PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK menempati peringkat ke 5 sebagai Badan Publik kategori Informatif di antara PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat. Pengumuman dan penganugerahan hasil pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM tahun 2023 disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM, tanggal 30 November 2023 oleh Plt. Kepala Badan POM , Dr.Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt.,M.Pharm., M.A.R.S

Tahapan "Pemeringkatan Monev KIP di Lingkungan BPOM tahun 2023" dilaksanakan dengan:

1. pengisian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* secara elektronik ,
2. verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Presentasi dan Wawancara Ketua PPID Pelaksana Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt,
M.Epid

Penilaian presentasi dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 secara daring oleh Tim Penilai dari internal BPOM yaitu Dra, Nany Bodrorini, Apt. dan dari eksternal BPOM, yaitu Tya Tirta Sari, M.Ikom (Komisi Informasi Pusat) dan Adhitya Ramadhan, SIP (praktisi media).

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Dit PMPUOTSKK

Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih kurang optimalnya sosialisasi jenis informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan yang dimiliki Dit PMPUOTSKK.

B. Kendala Internal Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK

Kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK antara lain:

1. Kurangnya pemahaman petugas layanan informasi terhadap pengelolaan layanan informasi publik.
2. Petugas belum dapat membedakan layanan PPID dan Layanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen.
3. Kurang optimalnya sosialisasi terkait pengelolaan layanan informasi publik yang diikuti oleh petugas layanan informasi di lingkungan internal Dit PMPUOTSKK, sehingga belum semua petugas memahami tugas dan fungsi PPID.
4. Pertunya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat PPID Pelaksana Dit PMPUOTSKK sehingga dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan beberapa kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan layanan informasi publik tahun 2023, maka untuk mempertahankan capaian tahun 2022 dan meningkatkan nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2023, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- A. Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - 1. Revisi Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.45.09.23.127 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang PPID di Lingkungan BPOM.
 - 2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM secara berkala setiap tahun
- B. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.
 - 1. Pemanfaatan sharing folder dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan updating informasi publik.
 - 2. Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik BPOM melalui berbagai media diantaranya media chatbot